

EFEKTIVITAS KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILU

Moh. Haris Ikhdam Kholid¹, Slamet Muchsin², Taufiq Rahman Ilyas³

*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
Email: harisikhdamkholid@gmail.com*

ABSTRAK

Partisipasi pemilih merupakan salah satu tolak ukur penting dalam menilai kualitas penyelenggaraan pemilihan umum pada sistem demokrasi. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak hanya berkewajiban melaksanakan seluruh tahapan pemilu sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, tetapi juga berperan dalam mendorong peningkatan kesadaran politik masyarakat agar menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat pencapaian tujuan tersebut. Penelitian menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi yang melibatkan komisioner KPU Kabupaten Lamongan sebagai informan utama. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang mencakup kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja KPU Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu Tahun 2024 dapat dikategorikan efektif. Kondisi tersebut tercermin dari pelaksanaan pendidikan pemilih yang berkelanjutan, intensifikasi kegiatan sosialisasi, optimalisasi media komunikasi digital, penguatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepemiluan. Efektivitas tersebut didukung oleh kompetensi sumber daya manusia, terbangunnya sinergi antarlembaga, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu. Di sisi lain, penelitian juga menemukan beberapa kendala, antara lain masih rendahnya tingkat kesadaran politik pada sebagian masyarakat, maraknya penyebaran misinformasi, belum meratanya akses terhadap informasi kepemiluan, serta sejumlah hambatan teknis pada pelaksanaan tahapan pemilu. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penyelenggara pemilu tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan melaksanakan setiap tahapan pemilu, tetapi juga oleh kemampuan membangun komunikasi publik yang lebih inklusif, memperkuat pendidikan politik masyarakat, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi sebagai pendukung penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.

Kata Kunci: Efektivitas Kinerja, Komisi Pemilihan Umum, Partisipasi Pemilih, Pemilu 2024, Kabupaten Lamongan.

Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan mekanisme konstitusional yang menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan kehidupan demokrasi. Melalui pemilu, prinsip kedaulatan rakyat diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang akan menjalankan fungsi pemerintahan maupun representasi politik. Oleh sebab itu, keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak hanya diukur dari terlaksananya seluruh tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari tingkat keterlibatan masyarakat dalam menggunakan hak pilih secara sadar, bebas, dan bertanggung jawab. Tingkat partisipasi pemilih yang tinggi menunjukkan kuatnya legitimasi terhadap hasil pemilu sekaligus mencerminkan kualitas demokrasi yang semakin baik.

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memegang peranan penting dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang demokratis. Tanggung jawab KPU tidak terbatas pada pelaksanaan setiap tahapan pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, tetapi juga mencakup upaya membangun kesadaran politik masyarakat melalui pendidikan pemilih, sosialisasi kepemiluan, serta penyediaan informasi yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi tersebut, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, serta kemampuan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi menjadi aspek yang menentukan terciptanya penyelenggaraan pemilu yang

berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik.

Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Lamongan menjadi momentum penting untuk menilai efektivitas kinerja KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Beragam strategi telah diterapkan, antara lain melalui penyelenggaraan pendidikan pemilih, pelaksanaan sosialisasi berbasis komunitas, optimalisasi media sosial dan platform digital sebagai sarana komunikasi publik, serta penguatan kemitraan dengan lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, media massa, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Berbagai upaya tersebut diarahkan untuk memperluas jangkauan informasi kepemiluan, meningkatkan literasi demokrasi, serta membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menggunakan hak pilih sebagai bagian dari tanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.

Di balik berbagai program yang telah dilaksanakan, peningkatan partisipasi pemilih masih menghadapi sejumlah tantangan yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemilu. Rendahnya literasi politik pada sebagian kelompok masyarakat, maraknya penyebaran misinformasi dan disinformasi melalui media digital, belum meratanya akses terhadap informasi kepemiluan, serta perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis di berbagai wilayah menjadi faktor yang memengaruhi tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pemilu. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan partisipasi pemilih tidak dapat dicapai hanya melalui intensifikasi kegiatan sosialisasi oleh penyelenggara pemilu, tetapi juga memerlukan dukungan, sinergi, dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan demokrasi yang lebih partisipatif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu Tahun 2024 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaan tugas kelembagaan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif agar mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai strategi yang diterapkan, implementasi program yang dijalankan, serta dinamika penyelenggaraan pemilu di tingkat daerah. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian administrasi publik, khususnya dalam bidang tata kelola kepemiluan, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pemilu dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas kinerja komisi pemilihan umum kabupaten lamongan dalam peningkatan partisipasi pemilu?
2. Bagaimana faktor penghambat dan faktor pendukung kinerja komisi pemilihan umum kabupaten lamongan dalam peningkatan partisipasi pemilu?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan indikator efektivitas organisasi yang meliputi kualitas kinerja, kuantitas kinerja, dan pemanfaatan waktu dalam penyelenggaraan pemilu.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mendukung serta menghambat kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Administrasi Publik yang berkaitan dengan efektivitas kinerja organisasi penyelenggara pemilu dan peningkatan partisipasi pemilih. Selain memperkaya kajian akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi, referensi, dan bahan pengembangan keilmuan bagi Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji tema serupa sehingga mampu mendukung pengembangan penelitian pada bidang administrasi publik dan tata kelola kepemiluan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Manfaat Bagi Penulis/Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta memperdalam pemahaman penulis mengenai efektivitas kinerja penyelenggara pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Selain itu, proses penelitian memberikan pengalaman praktis dalam penerapan metode penelitian ilmiah, mulai dari pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan karya ilmiah, sehingga dapat meningkatkan kemampuan akademik dan kompetensi penelitian penulis.
 - b. Manfaat Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah serta penyelenggara pemilu dalam meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemilu. Selain itu, temuan penelitian dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam memperkuat proses monitoring, evaluasi, dan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan partisipasi pemilih. Dengan demikian, upaya perbaikan kinerja penyelenggara pemilu dapat dilakukan secara berkelanjutan, baik pada tingkat daerah maupun tingkat nasional, guna mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang lebih efektif, transparan, dan demokratis.

Tinjauan Pustaka

Efektivitas Kinerja

Efektivitas kinerja menunjukkan tingkat kemampuan suatu organisasi dalam merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya secara efisien dan tepat sasaran. Dalam konteks organisasi publik, efektivitas tidak hanya diukur dari tercapainya target atau program kerja, tetapi juga ditentukan oleh kualitas pelaksanaan, kesesuaian antara perencanaan dan implementasi, serta dampak yang dihasilkan bagi masyarakat sebagai penerima layanan. Oleh karena itu, efektivitas kinerja mencerminkan sejauh mana organisasi mampu melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi serta memberikan manfaat yang nyata kepada publik.

Dalam perspektif administrasi publik, efektivitas kinerja berkaitan erat dengan kemampuan organisasi menghasilkan pelayanan yang berkualitas, tepat sasaran, tepat waktu, serta mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Organisasi yang efektif tidak hanya mampu mencapai target yang telah ditetapkan, tetapi juga mampu mengelola sumber daya manusia, memanfaatkan teknologi, serta menjalankan program sesuai ketentuan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan konsep efektivitas kinerja yang dikemukakan oleh Hasibuan sebagai landasan dalam menganalisis kinerja organisasi. Menurut Hasibuan, efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal. Suatu organisasi dikatakan efektif apabila mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan, baik dari aspek kualitas hasil, kuantitas pencapaian, maupun ketepatan waktu pelaksanaan. Ketiga indikator tersebut saling berkaitan dalam menggambarkan tingkat keberhasilan organisasi dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.

Indikator kualitas kinerja mencerminkan mutu hasil pekerjaan yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan organisasi. Indikator kuantitas kinerja berkaitan dengan tingkat pencapaian target atau volume pekerjaan yang mampu diselesaikan dalam periode tertentu. Sementara itu, indikator pemanfaatan waktu menunjukkan kemampuan organisasi dalam menyelesaikan setiap kegiatan secara tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Dengan demikian, ketiga indikator tersebut menjadi dasar analisis untuk menilai efektivitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum

Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan wujud keterlibatan warga negara dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai upaya untuk memengaruhi proses penyelenggaraan pemerintahan dan pengambilan kebijakan publik. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, partisipasi politik memiliki peranan penting karena mencerminkan tingkat kesadaran warga negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya, sekaligus menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga demokrasi. Partisipasi tersebut tidak hanya diwujudkan melalui penggunaan hak pilih pada saat pemilihan umum, tetapi juga melalui keikutsertaan dalam kegiatan pendidikan politik, sosialisasi kepemiluan, penyampaian aspirasi, serta pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu.

Tingkat partisipasi politik masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari aspek individu maupun lingkungan sosial. Pengetahuan dan pendidikan politik, kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara, tingkat kepercayaan kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu, kualitas informasi yang diterima masyarakat, serta kondisi sosial dan ekonomi merupakan faktor-faktor yang dapat mendorong meningkatnya partisipasi dalam pemilu. Sebaliknya, rendahnya literasi politik, berkembangnya misinformasi dan disinformasi, sikap apatis terhadap politik, serta keterbatasan akses terhadap informasi kepemiluan berpotensi menurunkan keterlibatan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dalam penelitian ini, partisipasi politik dimaknai sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, baik melalui penggunaan hak pilih maupun keikutsertaan dalam berbagai aktivitas yang mendukung terselenggaranya proses demokrasi secara berkualitas. Tingkat partisipasi tersebut dijadikan salah satu indikator untuk menilai efektivitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan fungsi pendidikan pemilih, sosialisasi kepemiluan, penyebaran informasi, serta pelayanan kepada masyarakat selama penyelenggaraan pemilu.

Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan sebagai penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Keberadaan KPU memiliki peran penting dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang demokratis, berintegritas, serta berlandaskan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam melaksanakan kewenangannya, KPU bertanggung jawab mengoordinasikan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, mulai dari penyusunan regulasi teknis, pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih, pelaksanaan setiap tahapan pemilu, penyelenggaraan pendidikan pemilih dan sosialisasi kepemiluan, hingga penetapan hasil pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Keberhasilan KPU tidak hanya ditentukan oleh terselenggaranya seluruh tahapan pemilu sesuai jadwal, tetapi juga oleh kemampuannya membangun kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, indikator kinerja KPU tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, melainkan juga mencakup kualitas pelayanan publik, efektivitas sosialisasi, akurasi data pemilih, ketepatan distribusi logistik, transparansi penyelenggaraan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Efektivitas kinerja Komisi Pemilihan Umum memiliki hubungan yang erat dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu. Semakin baik kualitas penyelenggaraan pemilu, sosialisasi yang dilakukan, pelayanan kepada masyarakat, serta kemampuan KPU membangun komunikasi publik, semakin besar pula peluang meningkatnya partisipasi pemilih. Sebaliknya, lemahnya pelaksanaan program sosialisasi, keterbatasan akses informasi, rendahnya kualitas pelayanan, maupun kurang optimalnya koordinasi antarpelenggara berpotensi menurunkan partisipasi masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, efektivitas kinerja KPU Kabupaten Lamongan dianalisis melalui pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, implementasi program peningkatan partisipasi pemilih, kepatuhan terhadap regulasi, serta pencapaian tujuan organisasi. Analisis tersebut kemudian dihubungkan dengan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu Tahun 2024 untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penyelenggaraan pemilu mampu mendorong meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena yang terjadi secara alamiah melalui perspektif para informan serta mengkaji secara mendalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi KPU dalam penyelenggaraan pemilu. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.

Penelitian dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan. Penentuan lokasi dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa KPU Kabupaten Lamongan merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Lamongan. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam pelaksanaan tugas kepemiluan. Informan penelitian terdiri atas komisioner KPU Kabupaten Lamongan yang membidangi Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik; Divisi Hukum dan Pengawasan; Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu; Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; serta Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pemilu. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, dokumen kelembagaan, laporan resmi, serta berbagai sumber lain yang relevan dengan fokus penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan memanfaatkan tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan tugas KPU, strategi yang diterapkan dalam meningkatkan partisipasi pemilih, serta berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas kinerja lembaga. Observasi dilakukan secara langsung terhadap aktivitas penyelenggaraan pemilu dan kondisi organisasi di lingkungan KPU Kabupaten Lamongan. Adapun dokumentasi dimanfaatkan sebagai data pendukung melalui penelaahan arsip, laporan kegiatan, foto, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian.

Untuk menjamin kredibilitas hasil penelitian, pengujian keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi, peer debriefing (diskusi dengan teman sejawat), dan member checking. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga data yang dihasilkan lebih konsisten. Selanjutnya, diskusi dengan teman sejawat dilakukan untuk memperoleh masukan

terhadap proses analisis dan interpretasi data. Adapun member checking dilakukan dengan mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada para informan guna memastikan bahwa data yang dianalisis telah sesuai dengan informasi yang mereka sampaikan.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian disusun untuk memberikan batasan yang jelas terhadap ruang lingkup penelitian sehingga proses pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data dapat dilakukan secara terarah, sistematis, serta selaras dengan tujuan penelitian. Penetapan fokus juga berfungsi sebagai pedoman dalam mengarahkan pembahasan agar lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti, yaitu efektivitas kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Fokus utama penelitian ini diarahkan pada analisis efektivitas kinerja KPU Kabupaten Lamongan sebagai lembaga penyelenggara pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Analisis tersebut didasarkan pada indikator efektivitas kinerja yang dikemukakan oleh Hasibuan (2003), yaitu kualitas kinerja, kuantitas kinerja, pemanfaatan waktu, dan pengembangan sumber daya manusia. Indikator kualitas kinerja digunakan untuk mengkaji kemampuan KPU dalam melaksanakan setiap tahapan pemilu sesuai dengan standar, prosedur, dan ketentuan yang berlaku. Indikator kuantitas kinerja difokuskan pada tingkat pencapaian program, kegiatan, serta target yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih. Selanjutnya, indikator pemanfaatan waktu digunakan untuk menilai ketepatan pelaksanaan setiap tahapan pemilu berdasarkan jadwal yang telah ditentukan. Adapun indikator pengembangan sumber daya manusia diarahkan pada upaya peningkatan kompetensi, kapasitas, dan profesionalisme penyelenggara pemilu melalui berbagai kegiatan pembinaan, pelatihan, maupun penguatan kapasitas yang mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang efektif, berintegritas, dan berkualitas.

Fokus kedua adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kinerja KPU Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Faktor pendukung meliputi kompetensi sumber daya manusia, dukungan regulasi, kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu. Sementara itu, faktor penghambat mencakup rendahnya kesadaran politik sebagian masyarakat, penyebaran misinformasi, keterbatasan pemerataan informasi kepemiluan, serta berbagai kendala teknis yang dihadapi selama pelaksanaan tahapan pemilu. Analisis terhadap faktor pendukung dan faktor penghambat tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas kinerja KPU Kabupaten Lamongan sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan strategi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu dan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pemilu berikutnya.

Situs dan Latar Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan yang dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lamongan. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada kesesuaiannya dengan fokus penelitian, yaitu menganalisis efektivitas kinerja KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Dengan demikian, lokasi penelitian diharapkan mampu menyediakan data dan informasi yang relevan untuk mendukung pencapaian tujuan penelitian.

Sumber Data

1. Data Primer

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu dengan mempertimbangkan tingkat pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan mereka dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lamongan. Teknik tersebut dipilih agar data yang diperoleh benar-benar relevan dengan fokus penelitian dan mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai efektivitas kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan lima komisioner KPU Kabupaten Lamongan yang dipilih sebagai informan utama karena memiliki tanggung jawab langsung pada bidang tugas masing-masing. Informan tersebut meliputi Komisioner Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik; Divisi Hukum dan Pengawasan; Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu; Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; serta Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi. Keterlibatan para komisioner tersebut diharapkan mampu memberikan informasi yang akurat mengenai pelaksanaan program, strategi peningkatan partisipasi pemilih, serta berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas kinerja KPU Kabupaten Lamongan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Data Sekunder

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui penelaahan berbagai dokumen yang berkaitan dengan

penelitian, meliputi peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, laporan resmi, dokumen kelembagaan, data kepemiluan, serta sumber tertulis lainnya yang relevan. Data sekunder digunakan untuk melengkapi, memperkuat, dan memverifikasi informasi yang diperoleh dari hasil wawancara sehingga analisis penelitian menjadi lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengaplikasikan beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi dilakukan secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Lamongan selama proses penelitian. Melalui teknik ini, peneliti mengamati aktivitas penyelenggaraan pemilu, koordinasi antardivisi, pelaksanaan program sosialisasi, serta berbagai kegiatan yang berkaitan dengan upaya peningkatan partisipasi pemilih. Observasi dilakukan secara terbuka sehingga seluruh informan mengetahui keberadaan peneliti selama proses pengumpulan data berlangsung.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan lima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan yang ditetapkan sebagai informan utama penelitian. Pemilihan bentuk wawancara ini memberikan keleluasaan kepada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi di lapangan tanpa mengabaikan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Proses wawancara diarahkan untuk memperoleh informasi mengenai efektivitas kinerja KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Data yang dihimpun meliputi pelaksanaan tugas dan fungsi pada setiap divisi, strategi yang diterapkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, pelaksanaan tahapan pemilu, serta berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Lamongan.

3. Dokumentasi

Selain itu, dokumentasi digunakan sebagai sumber data pendukung melalui penelaahan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti laporan kegiatan, arsip kelembagaan, data partisipasi pemilih, foto kegiatan, serta peraturan dan dokumen resmi lainnya. Data dokumentasi dimanfaatkan untuk melengkapi, memperkuat, dan memverifikasi informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi sehingga hasil penelitian memiliki tingkat keabsahan yang lebih baik.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Model tersebut dipilih karena memungkinkan proses analisis berlangsung secara terus-menerus sejak data mulai dikumpulkan hingga penelitian selesai. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat melakukan penelaahan, pengorganisasian, dan penafsiran data secara sistematis sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Tahapan analisis data meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.

1) Pengumpulan Data (Data Collection)

Tahap awal analisis diawali dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian. Seluruh data yang diperoleh dihimpun sebagai bahan utama dalam proses analisis untuk menggambarkan kondisi empiris terkait pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Lamongan. Data yang telah terkumpul kemudian dipersiapkan untuk memasuki tahapan analisis berikutnya.

2) Kondensasi Data (Data Condensation)

Pada tahap ini, peneliti melakukan proses seleksi, penyederhanaan, pengelompokan, dan pemusatan perhatian terhadap data yang relevan dengan tujuan penelitian. Kondensasi data bertujuan mengurangi informasi yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian tanpa menghilangkan makna utama yang terkandung di dalamnya. Melalui proses tersebut, data menjadi lebih terstruktur sehingga memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi informasi yang memiliki keterkaitan dengan efektivitas kinerja KPU Kabupaten Lamongan.

3) Penyajian Data (Data Display)

Data yang telah melalui proses kondensasi selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian naratif yang disusun secara sistematis. Penyajian data bertujuan mempermudah peneliti dalam memahami hubungan antarkategori, mengenali pola-pola tertentu, serta menginterpretasikan berbagai temuan yang muncul selama penelitian. Tahap ini juga menjadi dasar dalam menyusun argumentasi dan pembahasan hasil penelitian secara komprehensif.

4) Memverifikasi Kesimpulan (Drawing and Verification Conclusion)

Tahap akhir analisis dilakukan melalui penarikan kesimpulan yang disertai dengan proses verifikasi secara berkelanjutan. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data untuk memastikan konsistensi, ketepatan, dan kredibilitas temuan

penelitian. Hasil akhir dari proses tersebut berupa kesimpulan yang mampu menjawab rumusan masalah penelitian mengenai efektivitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 serta didukung oleh data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji untuk menjamin bahwa temuan yang dihasilkan memiliki tingkat kredibilitas, konsistensi, dan ketepatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menerapkan beberapa teknik pengujian keabsahan data, yaitu triangulasi teknik, *peer debriefing* (diskusi dengan teman sejawat), dan *member checking*. Ketiga teknik tersebut digunakan secara terpadu untuk meminimalkan subjektivitas peneliti serta meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian.

1. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Perbandingan tersebut bertujuan untuk menguji konsistensi data sekaligus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari setiap teknik saling mendukung dan memberikan gambaran yang utuh mengenai efektivitas kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum.

2. Diskusi Teman Sejawat

Diskusi dengan teman sejawat dilakukan sebagai upaya memperoleh masukan, kritik, dan saran terhadap proses analisis maupun interpretasi data. Melalui proses ini, peneliti dapat mengevaluasi hasil analisis secara lebih objektif, mengidentifikasi kemungkinan adanya bias, serta memperkuat argumentasi yang disusun berdasarkan temuan penelitian.

3. Member Checking

Selain itu, Member checking dilaksanakan dengan mengonfirmasi kembali hasil wawancara dan interpretasi data kepada para informan penelitian. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa informasi yang dianalisis telah sesuai dengan pengalaman, pandangan, dan penjelasan yang disampaikan oleh informan sehingga hasil penelitian memiliki tingkat akurasi dan kredibilitas yang lebih tinggi.

Hasil dan Pembahasan

1. Efektivitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan dalam Peningkatan Partisipasi Pemilu

Efektivitas kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan partisipasi pemilih tercermin dari kemampuan lembaga dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan program kerja yang telah direncanakan untuk mendorong keterlibatan masyarakat pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Berdasarkan hasil wawancara, KPU Kabupaten Lamongan secara konsisten mengembangkan berbagai strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan menyesuaikan karakteristik sosial, geografis, serta kebutuhan informasi masyarakat. Program yang disusun tidak hanya berorientasi pada pemenuhan tahapan penyelenggaraan pemilu, tetapi juga diarahkan untuk memperluas akses informasi kepada kelompok masyarakat yang memiliki tingkat partisipasi relatif rendah.

Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai program pendidikan pemilih dan sosialisasi, seperti *Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP)*, *KPU Goes to School*, *KPU Goes to Campus*, serta sosialisasi berbasis komunitas. Program-program tersebut menjadi media untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penggunaan hak pilih sekaligus memperkuat literasi politik, khususnya bagi pemilih pemula, pemilih muda, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Selain itu, pemanfaatan media digital sebagai sarana penyebaran informasi ke pemilu memperluas jangkauan sosialisasi sehingga informasi dapat diterima oleh masyarakat secara lebih cepat dan efektif.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Lamongan menerapkan strategi sosialisasi yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kelompok sasaran. Pendekatan tersebut dilakukan melalui penyusunan materi dan metode penyampaian yang berbeda sesuai dengan kebutuhan setiap segmen pemilih. Strategi ini menunjukkan adanya upaya adaptif dalam pelaksanaan pendidikan pemilih sehingga informasi ke pemilu dapat diterima secara lebih mudah oleh berbagai lapisan masyarakat.

Ditinjau dari teori efektivitas kinerja Hasibuan (2003), temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program KPU Kabupaten Lamongan telah memenuhi indikator efektivitas. Dari aspek kualitas kinerja, KPU mampu menyelenggarakan program sosialisasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung peningkatan pemahaman politik. Dari aspek kuantitas kinerja, berbagai program sosialisasi berhasil dilaksanakan melalui beragam media dan menjangkau berbagai kelompok pemilih. Dari aspek pemanfaatan waktu, seluruh kegiatan sosialisasi dilaksanakan mengikuti tahapan penyelenggaraan pemilu sehingga informasi dapat diterima masyarakat sebelum hari pemungutan suara. Sementara itu, dari aspek pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas penyelenggara dilakukan melalui koordinasi internal, pembekalan teknis, serta penguatan kompetensi petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kinerja KPU Kabupaten Lamongan tidak hanya diukur dari terlaksananya program kerja, tetapi juga dari kemampuannya membangun komunikasi publik, memperluas akses informasi ke pemilu, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menggunakan hak pilih. Dengan demikian, pelaksanaan program yang didukung oleh strategi sosialisasi yang adaptif serta pengelolaan sumber daya yang memadai menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

a) Kualitas Kinerja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek kualitas kinerja, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan mampu melaksanakan setiap tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan tugas pada setiap divisi berjalan secara terintegrasi melalui koordinasi yang baik sehingga seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu dapat dilaksanakan secara tertib dan sistematis. Selain itu, penerapan prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan menjadi faktor yang memperkuat kualitas kinerja lembaga. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa KPU Kabupaten Lamongan memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu serta memberikan pelayanan ke pemilu yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

b) Kuantitas Kinerja

Ditinjau dari aspek kuantitas kinerja, KPU Kabupaten Lamongan menunjukkan capaian yang baik melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan partisipasi pemilih. Sosialisasi ke pemilu dilaksanakan secara berkesinambungan dengan memanfaatkan berbagai media dan saluran komunikasi, baik melalui pertemuan tatap muka maupun media digital. KPU juga membangun kerja sama dengan lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta komunitas lokal untuk memperluas jangkauan edukasi ke pemilu. Intensitas pelaksanaan program tersebut menunjukkan bahwa KPU tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berupaya memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi.

c) Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu menjadi salah satu indikator yang menunjukkan efektivitas penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Lamongan. Berdasarkan hasil penelitian, setiap tahapan pemilu, mulai dari penyusunan jadwal kegiatan, pemutakhiran data pemilih, distribusi logistik, pelaksanaan pemungutan suara, hingga proses rekapitulasi hasil, dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Ketercapaian tersebut mencerminkan adanya koordinasi internal yang efektif, perencanaan yang matang, serta kesiapan sumber daya organisasi dalam mengelola setiap tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu.

d) Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pada aspek pengembangan sumber daya manusia, KPU Kabupaten Lamongan secara konsisten melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kompetensi penyelenggara pemilu. Peningkatan kapasitas dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis, rapat koordinasi, serta kegiatan pembinaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing tahapan pemilu. Upaya tersebut bertujuan memperkuat kemampuan teknis, meningkatkan profesionalisme, serta memastikan setiap penyelenggara memiliki pemahaman yang memadai terhadap regulasi dan prosedur ke pemilu. Dengan kompetensi yang semakin baik, kualitas pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat terus ditingkatkan.

e) Partisipasi Politik

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya perubahan yang nyata dalam tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Peningkatan tersebut tercermin dari semakin tingginya keterlibatan masyarakat dalam menggunakan hak pilih, yang didukung oleh pelaksanaan sosialisasi secara lebih luas, pemanfaatan media digital sebagai sarana penyebaran informasi ke pemilu, serta kolaborasi KPU dengan berbagai pemangku kepentingan. Temuan ini mengindikasikan bahwa strategi yang diterapkan KPU Kabupaten Lamongan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesadaran politik masyarakat. Dengan demikian, efektivitas kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang erat dengan keberhasilan dalam mendorong partisipasi pemilih pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilu

a. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan partisipasi pemilih dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung.

Salah satu faktor utama adalah tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam penyelenggaraan pemilu sehingga mampu menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Selain itu, koordinasi yang terjalin dengan baik antardivisi turut mendukung kelancaran pelaksanaan setiap tahapan pemilu serta memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program kerja.

Faktor pendukung lainnya berasal dari adanya regulasi yang jelas sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemilu. Kejelasan dasar hukum tersebut memberikan arah bagi setiap tahapan pelaksanaan sekaligus meminimalkan terjadinya perbedaan dalam pengambilan keputusan. Di samping itu, pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu unsur penting yang mendukung efektivitas kerja KPU, terutama dalam penyebarluasan informasi kepemiluan, pelaksanaan sosialisasi, serta penyampaian berbagai informasi kepada masyarakat secara lebih cepat dan luas.

Keberhasilan pelaksanaan program peningkatan partisipasi pemilih juga didukung oleh terbangunnya kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, media massa, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan berbagai unsur lainnya. Sinergi tersebut memperluas jangkauan sosialisasi, meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi kepemiluan, serta memperkuat upaya pendidikan politik sehingga mendorong meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Faktor Penghambat

Selain didukung oleh berbagai faktor internal dan eksternal, hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Lamongan juga menghadapi sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program peningkatan partisipasi pemilih. Salah satu hambatan yang paling menonjol adalah masih rendahnya tingkat kesadaran politik pada sebagian masyarakat, yang berdampak pada kurang optimalnya pemanfaatan hak pilih dalam penyelenggaraan pemilu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi pemilih tidak hanya dipengaruhi oleh upaya penyelenggara pemilu, tetapi juga oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan dalam proses demokrasi.

Hambatan lainnya berkaitan dengan maraknya penyebaran misinformasi dan disinformasi yang berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat terhadap proses kepemiluan. Selain itu, belum meratanya jangkauan kegiatan sosialisasi di beberapa wilayah menyebabkan sebagian masyarakat belum memperoleh informasi kepemiluan secara optimal. Penelitian juga menemukan adanya kendala teknis pada beberapa tahapan penyelenggaraan pemilu yang memerlukan penyesuaian dan koordinasi lebih lanjut agar tidak memengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Di samping itu, perbedaan karakteristik sosial, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, serta letak geografis masyarakat turut memengaruhi efektivitas strategi sosialisasi yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Lamongan. Perbedaan tersebut mengakibatkan pendekatan yang efektif pada suatu kelompok masyarakat belum tentu memberikan hasil yang sama pada kelompok lainnya. Oleh karena itu, diperlukan strategi sosialisasi yang lebih adaptif, inklusif, dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kelompok sasaran agar upaya peningkatan partisipasi pemilih dapat terlaksana secara lebih optimal.

Kesimpulan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kinerja KPU Kabupaten Lamongan tidak hanya diukur dari keberhasilan menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu sesuai ketentuan, tetapi juga dari kemampuan lembaga dalam membangun komunikasi publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Berbagai strategi sosialisasi yang dilaksanakan melalui pendekatan langsung maupun media digital mampu memperluas jangkauan informasi kepemiluan sehingga mendorong meningkatnya kesadaran politik masyarakat.

Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa keberhasilan peningkatan partisipasi pemilih merupakan hasil sinergi antara kapasitas organisasi, kompetensi sumber daya manusia, dukungan teknologi informasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Meskipun demikian, berbagai hambatan yang masih ditemui menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi pemilih memerlukan inovasi sosialisasi yang lebih adaptif, khususnya dalam menjangkau kelompok pemilih muda, masyarakat di wilayah terpencil, dan kelompok dengan tingkat literasi politik yang masih rendah.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperkuat bahwa efektivitas kinerja penyelenggara pemilu merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Semakin baik kualitas pelayanan, komunikasi publik, dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU, semakin besar pula peluang meningkatnya partisipasi masyarakat dalam setiap penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 telah berjalan secara efektif. Efektivitas tersebut tercermin dari kemampuan KPU dalam melaksanakan seluruh tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengoptimalkan program sosialisasi dan pendidikan pemilih, memanfaatkan media

digital sebagai sarana penyebaran informasi ke pemilu, serta membangun koordinasi yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan. Berbagai upaya tersebut memberikan kontribusi terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa efektivitas kinerja KPU dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain kompetensi sumber daya manusia, koordinasi antardivisi yang berjalan dengan baik, dukungan regulasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta kerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, media massa, dan organisasi masyarakat. Di sisi lain, masih terdapat sejumlah faktor yang menghambat optimalisasi kinerja, seperti rendahnya kesadaran politik sebagian masyarakat, penyebaran disinformasi mengenai pemilu, keterbatasan jangkauan sosialisasi di beberapa wilayah, serta berbagai kendala teknis yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak hanya ditentukan oleh kelancaran pelaksanaan tahapan secara administratif, tetapi juga oleh kemampuan penyelenggara pemilu dalam membangun komunikasi publik, meningkatkan pendidikan politik masyarakat, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan, inovasi strategi sosialisasi, dan penguatan kapasitas kelembagaan menjadi faktor penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang lebih partisipatif, transparan, dan berintegritas.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut.

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan perlu terus mengembangkan inovasi dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, media sosial, serta berbagai platform digital. Upaya tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan penyebaran informasi ke pemilu dan meningkatkan akses masyarakat, terutama bagi pemilih pemula serta kelompok masyarakat yang selama ini masih sulit dijangkau.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu perlu dilakukan secara berkesinambungan melalui pelatihan, bimbingan teknis, pendampingan, dan evaluasi berkala. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kompetensi, profesionalisme, serta kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
3. KPU Kabupaten Lamongan diharapkan semakin memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, media massa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Sinergi tersebut penting untuk mendukung pelaksanaan pendidikan politik, memperluas sosialisasi ke pemilu, serta membangun budaya demokrasi yang lebih partisipatif sehingga kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih dapat terus meningkat.
4. Upaya pencegahan dan penanggulangan misinformasi maupun disinformasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu perlu dioptimalkan melalui penyediaan informasi resmi yang cepat, akurat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, penguatan literasi digital masyarakat juga perlu menjadi perhatian agar masyarakat lebih mampu menyaring informasi serta tidak mudah terpengaruh oleh berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
5. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian mengenai efektivitas kinerja penyelenggara pemilu dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*). Penggunaan pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan analisis yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara efektivitas kinerja penyelenggara pemilu dengan tingkat partisipasi pemilih, sekaligus memperkaya pengembangan kajian dalam bidang administrasi publik dan tata kelola ke pemilu.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Hartini, Y., dkk. (2022). *Efektivitas Kinerja Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kota Bengkulu Tahun 2018*.
- Indrayan, S. (2024). *Optimalisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya dalam Mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2024*.
- Pulungan, M. C., dkk. (2019). *Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2019*.
- Syah, E. F., dkk. (2020). *Efektivitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Wali Kota Makassar Tahun 2020*.

Buku

- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). *Participation's Place in Rural Development: Seeking Clarity Through*

- Specificity*. New York: Cornell University.
- Dahl, R. A. (2001). *On Democracy*. New Haven: Yale University Press.
- Gunawan, A. (2003). *Efektivitas Organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Harahap. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Medan.
- Hasibuan, M. S. P. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, M. S. P. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Edisi Revisi). Jakarta: Bumi Aksara.
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Mikkelsen, B. (2011). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations* (5th ed.). New York: Free Press.
- Sedarmayanti. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama.
- Siagian, S. P. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Steers, R. M. (1977). *Organizational Effectiveness: A Behavioral View*. Santa Monica: Goodyear Publishing.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Widodo. (2014). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers.

Peraturan Perundang-undangan

- KPU Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dokumen Resmi

- Pemerintah Kabupaten Lamongan. (2023). *Profil Kabupaten Lamongan*. Lamongan.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan. (2024). *Kabupaten Lamongan Dalam Angka 2024*.
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan. (2023). *Profil Pariwisata Kabupaten Lamongan*.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan. (2024). *Data Partisipasi Pemilih Pemilu Tahun 2024*.